



Buletin Parlementaria

Nomor 1121/II/IX/2020 • September 2020

DPR Dorong STIN Lahirkan Intelijen Berkelas Dunia



4 Pendaftaran Bakal Paslon Pilkada Jangan Jadi Klaster Covid-19



6 Komisi I Sepakati DIM RUU Perlindungan Data Pribadi



9 772614 339005

DPR Dorong STIN Lahirkan Intelijen Berkelas Dunia

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung dan mengapresiasi perjalanan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi *world class intelligence*. Menurut Puan, sudah seharusnya BIN, melalui Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), melahirkan sumber daya manusia (SDM) di bidang intelijen yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

“Saya mengapresiasi berbagai pengembangan, pembaruan, dan inovasi di berbagai bidang yang dilakukan BIN melalui STIN,” kata Puan, saat menyampaikan sambutannya dalam Inaugurasi Peningkatan Statuta STIN dan peresmian Patung Bung Karno, di Plaza STIN, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9).

Puan memuji langkah BIN yang meningkatkan studi keilmuan intelijen di STIN melalui pembukaan program Magister dan Doktor, pengembangan kurikulum pendidikan, peningkatan kompetensi atau *skill*, dan pembaruan berbagai fasilitas pendidikannya. Ia menilai, BIN perlu memperkuat deteksi dini dan peringatan dini dalam spektrum yang sangat luas. Apalagi di era sekarang, ketika informasi atau data adalah sesuatu yang dianggap sangat berharga di mata banyak pihak.

“Sudah seharusnya intelijen Indonesia berdiri sejajar dengan intelijen negara-negara maju lainnya. Karena kita adalah bangsa dan negara yang besar. Karena itu, negara meletakkan harapan besar pada pundak BIN, kepada STIN, untuk melahirkan SDM intelijen Indonesia yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, dan memiliki rasa pengabdian tinggi kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini melanjutkan.

Saat ini, kata Puan, era kemajuan



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meresmikan Patung Bung Karno di Plaza STIN, Bogor. Foto: Kresno/MAN

teknologi dan industri yang semakin cepat dan dinamis telah membawa masyarakat terbuka dan terhubung secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Sejalan dengan itu, tantangan juga semakin lebar, mulai dari tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali/hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur agama dan budaya, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selain itu, persaingan perekonomian global, juga semakin menuntut kesiapan daya saing perekonomian nasional dan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, Puan meminta dalam melaksanakan praktik intelijen, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus dalam mengamankan kepentingan nasional. “Intelijen negara juga dituntut memiliki rasa cinta pada Tanah Air yang tinggi, cinta Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila,” tegas Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan juga

meresmikan Patung Bung Karno di Plaza STIN. Turut hadir, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Mewakili keluarga besar Presiden Soekarno, Puan menyampaikan, sebagai bagian penting dari menanamkan rasa pengabdian kepada bangsa dan negara, maka sejarah Indonesia dan semangat para pendiri bangsa harus selalu diingat. “Saya mengajak para Taruna STIN dan segenap anggota BIN agar ketika melihat Patung Bung Karno ini maka mengingat pengabdian beliau kepada Indonesia,” ajak Puan.

Puan juga menyampaikan terima kasih atas pemberian brevet dan penganugerahan Warga Kehormatan STIN yang diberikan kepadanya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada personel BIN atas jasa-jasanya kepada Indonesia. Jasa-jasa yang mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi berbahagialah karena jasa-saja saudara selama ini turut menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia,” pungkas legislator dapil Jateng V itu. ■ sf

Sanksi Tunda Pelantikan Pemenang Pilkada Perlu Dikaji Mendalam

Kementerian Dalam Negeri bersama lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu akan memberikan sanksi tegas bagi calon kepala daerah (cakada) yang menang, namun terbukti melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 berupa penundaan pelantikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa hal itu merupakan otoritas kewenangan dari Kemendagri. Meski demikian, Dasco meminta agar Kemendagri juga melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai sanksi-sanksi kepada cakada tersebut.

“Terhadap pasangan calon yang kalah, (Kemendagri) juga harus dikasih sanksi kalau (terbukti) melanggar protokol kesehatan Covid-19,” tandas Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9). Menurutnya, lebih baik diadakan pencegahan sanksi di awal agar bisa

”

LEBIH BAIK DIADAKAN PENCEGAHAN SANKSI DI AWAL AGAR BISA MENGANTISIPASI TERJADINYA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

mengantisipasi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

“Sanksi di awal itu, katakanlah ada peraturan KPU soal protokol kesehatan, maka Bawaslu juga harus bertindak tegas di lapangan. Sehingga sanksi di awal ini kemudian bisa mengantisipasi supaya tidak ada sanksi di belakang. Karena ini kan rentang waktu antara kampanye dan pemilihan masih berapa bulan lagi,” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu menutup pernyataannya. ■ dep/es



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Yoga/MAN



DPR Dorong STIN Lahirkan Intelijen Berkelas Dunia

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Pendaftaran Bakal Paslon Pilkada Jangan Jadi Klaster Covid-19

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin berharap proses pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 jangan sampai menjadi klaster penyebaran Covid-19. Ia meminta dengan tegas agar penyelenggara Pemilu dan peserta harus dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dia menilai penerapan protokol kesehatan itu harus dilakukan sejak awal seperti saat pendaftaran menjadi peserta Pilkada dan tidak terlalu banyak

”

SAYA HARAPKAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PILKADA SERENTAK 2020 BUKAN MENJADI SEBUAH KLASTER BARU PENYEBARAN COVID-19 SAAT PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam
M. Azis Syamsuddin. Foto: Azka/MAN



membawa simpatisan. “Saya harapkan pelaksanaan pendaftaran Pilkada serentak 2020 bukan menjadi sebuah klaster baru penyebaran Covid-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon,” kata Azis dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Sabtu (5/9).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mendesak penyelenggara Pemilu dapat membatasi jumlah pendamping bakal pasangan calon yang masuk saat melakukan pendaftaran. Ia mencontohkan maksimal satu orang dari partai pengusung dan tidak melakukan iring-iringan dengan jumlah massa yang banyak.

“Apabila bakal paslon didukung 5 partai, maka cukup perwakilan 1 orang ketua partai di daerah tersebut yang mendampingi. Langkah ini untuk menjaga dan menghindari berkumpulnya massa saat berlangsungnya pendaftaran,” saran politisi Partai Golkar itu.

Azis juga berharap agar penyelenggara Pemilu dapat menyiarkan secara langsung proses pendaftaran bakal paslon peserta Pilkada 2020 melalui aplikasi sosial media. Langkah itu menurutnya agar masyarakat dapat melihat secara virtual dari rumah atau luar gedung KPUD untuk menghindari kerumunan yang menjadi bagian dari penerapan protokol kesehatan.

“Seiring perkembangan teknologi, tentunya ini menjadi sebuah jawaban keinginan masyarakat melihat langsung bakal paslon Pilkada serentak yang didukungnya melalui sosial media saat mendaftar dengan cara yang unik dari setiap paslon,” tutur legislator dapil Lampung II itu. ■ sf

Peringatan Haornas, Ketua DPR Minta Pemerintah Jamin Masa Depan Atlet

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang diperingati setiap 9 September harus menjadi momentum Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada atlet dan mantan atlet. Menurut Puan, pengorbanan seorang atlet selama bertahun-tahun untuk berlatih, bertanding, hingga mengukir prestasi demi kejayaan Indonesia di berbagai kompetisi olahraga patut diapresiasi.

“Masa muda seorang atlet dihabiskan untuk berlatih dan berjuang demi kejayaan Tanah Air. Pemerintah pusat maupun daerah mesti bertanggung jawab untuk memperhatikan masa depan para atlet tersebut,” kata Puan saat memberikan tanggapan terkait Haornas 2020 di Jakarta, Rabu (9/9). Tema Haornas 2020 yang diusung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) adalah *Sport Science*, *Sport Industry* dan *Sport Tourism*.

Puan menegaskan, DPR RI melalui fungsi legislasinya berkomitmen mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Dia berharap revisi UU tersebut akan meningkatkan sistem pembinaan atlet, serta penghargaan dan kesejahteraan bagi para atlet. “Pemerintah harus hadir, bertanggung jawab atas masa depan atlet, dan fasilitas olahraga masyarakat,” ujarnya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) masa jabatan 2014-2019 itu mengingatkan harus ada upaya komprehensif dari



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/MAN

Pemerintah untuk mewujudkan *Sport Tourism* di Indonesia. Thailand bisa menjadi contoh dalam mengelola *Sport Tourism* secara menyeluruh. Diketahui, pada tahun 2018, pendapatan Thailand dari industri olahraga, termasuk pariwisata dan pakaian olahraga, mencapai 6,37 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Pengembangan industri olahraga Thailand diketahui adalah bagian dari rencana pembangunan nasional negara tersebut.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, Pemerintah Thailand mengadopsi skema *Public Private Partnership* (PPP) untuk manajemen fasilitas olahraga, mendorong swasta berinvestasi membangun *venue* olahraga seperti stadion dan kolam renang. Lebih jauh lagi, Pemerintah Thailand juga memberikan sejumlah kemudahan bagi sektor swasta berupa keringanan pajak untuk berinvestasi di

sektor olahraga.

“Jika Pemerintah Indonesia serius memajukan *Sport Tourism*, maka bisa belajar dari negara tetangga yang terbukti berhasil meraup pendapatan besar dari sektor tersebut,” ungkap legislator dapil JawaTengah V itu.

Selain itu, merespon tingginya minat dan semangat masyarakat Indonesia untuk berolahraga dan menjaga pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19, Puan meminta Pemerintah memfasilitasi sarana berolahraga yang memadai, aman, dan nyaman.

“Melonjaknya aktivitas olahraga di masyarakat tak lepas dari upaya meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari Covid-19. Karena itu, penyediaan dan perawatan fasilitas olahraga untuk masyarakat, serta pembinaan atlet, dapat terpenuhi jika ada kecermatan dalam penggunaan anggaran olahraga,” jelas Puan. ■ **ann/sf**

Komisi I Sepakati DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM membahas materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Dalam Rapat Kerja itu disetujui 66 DIM usulan tetap yang telah disepakati DPR RI bersama Pemerintah, dalam hal ini Kominfo. “Dengan demikian 66 DIM sudah kita sepakati, ada progres sudah dan akan kita lanjutkan dalam rapat Panja,” ujar Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Adapun, klaster DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi antara lain usulan tetap sebanyak 66 DIM, usulan tetap dengan catatan berjumlah 49 DIM, usulan perubahan substansi ada 179 DIM dan usulan perubahan redaksional sebanyak 9 DIM. Sementara, ada 68 DIM usulan baru.

Menurut Kharis, pembahasan DIM akan dilanjutkan dalam rapat Panja. “Untuk klaster DIM usulan tetap dengan catatan, DIM usulan perubahan substansi, DIM usulan baru dapat kita setuju untuk dibahas dalam rapat Panja,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

Sementara DIM yang sudah menjadi usulan tetap, akan dibahas kembali jika terdapat perubahan substansi pada DIM lainnya. “Untuk rapat berikutnya, kita sudah masuk dalam rapat Panja untuk membahas materi



Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari. Foto: OJ/IMAN

”

**DENGAN DEMIKIAN
66 DIM SUDAH KITA
SEPAKATI, ADA
PROGRES SUDAH
DAN AKAN KITA
LANJUTKAN DALAM
RAPAT PANJA**

RUU Pelindungan Data Pribadi, yaitu untuk membahas poin-poin di luar DIM usulan tetap,” tutup Kharis.

Sebagaimana diketahui, RUU PDP ditargetkan akan rampung pada November 2020. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam laporannya mengatakan pihaknya siap bergerak cepat guna mengakselerasi pembahasan RUU PDP. “Kami tentu berharap dengan keputusan rapat kerja hari ini Panja Timus dan bisa bekerja secara cepat dan efektif. Pemerintah siap dan masyarakat menanti kita untuk menghasilkan payung hukum yang memadai untuk pelindungan data pribadi rakyat,” ujarnya. ■ ann/es

Komisi II **Setujui** Pagu Anggaran LAN, ANRI dan ORI Tahun 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2021 sebesar Rp 325,005 miliar. Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta LAN melakukan penyesuaian dan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan LAN sebesar Rp 43,593 miliar dan mengamanatkan kepada Anggota Banggar di Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan dan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” kata Yaqut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Yaqut juga menyatakan, Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Arsip Nasional

”

MEMINTA LAN MELAKUKAN PENYESUAIAN DAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KOMISI II DPR RI YANG KEMUDIAN AKAN DIBAHAS KEMBALI

Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2021 sebesar Rp 292,439 miliar. Untuk mengalokasikan anggaran program dan kegiatan, Komisi II meminta ANRI melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II.

“Komisi II DPR RI juga menyetujui Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2021 sebesar Rp 206,972 miliar. Dan Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh ORI sebesar Rp 48,289 miliar dan mengamanatkan kepada Anggota Banggar di Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” papar Yaqut. ■ dep/es

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas.
Foto: Gerald/MAN



Komisi III akan Bedah Sejumlah Kasus Impor Ilegal



Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir saat rapat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Surabaya. Foto: Eko/MAN

Komisi III DPR RI memberi perhatian khusus pada persoalan yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata. Komisi III menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, Komisi III akan membedah sejumlah kasus impor ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan telah mendapat banyak masukan atas kasus ini. Salah

satunya terkait kejadian penyelundupan tekstil di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tak hanya itu ada dugaan barang lain yang masuk ke Indonesia, seperti bawang, mobil mewah hingga barang elektronik yang tidak sesuai prosedur. “Kita tidak akan berhenti, ini pintu masuknya di sini, kami mendapatkan banyak masukan terkait kebocoran hal ini,” tandas Adies usai rapat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (2/9).

Atas maraknya masalah tersebut, Komisi III berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal penyidikan kasus penyelundupan tekstil di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Adies Kadir mengatakan Pansus ini akan menggandeng komisi lain di DPR RI untuk meminimalisir terjadinya

kebocoran devisa negara dari kasus penyelundupan tekstil. Menurut politisi Fraksi Golkar ini, sepulang dari kunjungan kerja spesifik, Komisi III akan langsung membahas pembentukan Pansus.

“Ada usulan untuk dibentuk Pansus, agar Pansus kita bisa meminimalisir unsur kebocoran itu. Komisi III, Komisi VI Komisi XI mungkin. Kita meminimalisir untuk pintu masuknya di sini, kami pulang akan langsung kita bahas. Kalau ini akan jalan terus,” ungkap Adies.

Adies Kadir menjelaskan, asus tersebut bermula dari dugaan penyimpangan 69 kontainer tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dilakukan oleh PT. Anugerah Citra Cendana sebagai pengimpor (pada 3 Agustus 2020). Dugaan terjadi terhadap 7 kontainer milik PT. Anugerah yang masuk ke Pelabuhan pada 29 Juni 2020, 28 kontainer yang berisi kain berbahan polyester dan woven sebulan kemudian, dan terakhir 45 unit.

Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Kejati Jawa Timur. Kejaksaan menduga surat keterangan asal kontainer ini bermasalah atau diduga pengimpor menghindari kutipan bea masuk (bea safeguard). Kejaksaan kemudian telah menyegel semua kontainer yang diduga terdapat kejanggalan, karena pengimpor selalu mendatangkan kontainer berisi bahan baku tekstil lewat Pelabuhan Tanjung Perak.

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil menyebutkan impor tekstil harus dimasukkan ke pelabuhan terdekat dari lokasi industri, yakni seharusnya dalam kasus ini adalah Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta Utara. ■ eko/es

Komisi IV Apresiasi Pemanfaatan Limbah Pasar Menjadi Pupuk Organik

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengapresiasi pemanfaatan limbah atau sampah pasar menjadi pupuk organik yang berguna untuk tanaman pertanian yang dilakukan oleh PT. Bio Konversi Indonesia. Hal ini diungkapkan Dedi saat mengunjungi pabrik pengolahan limbah PT. Bio Konversi Indonesia, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/9).

“Selama ini limbah organik dan non-organik belum optimal dimanfaatkan. Dan kebetulan ada industri (walaupun

saya lihat skalanya masih kecil), mampu memanfaatkan seluruh limbah. Kami lihat bersama, limbah yang digunakan merupakan limbah pasar. Dan ini menurut saya sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, yang diawali dengan pertumbuhan ekosistem,” ujar Dedi.

Pemanfaatan sampah pasar ini, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu, tidak hanya berguna untuk kesehatan lingkungan sekitar, namun juga bermanfaat untuk pertanian. Bahkan tidak hanya itu pupuk organik ini selain harganya lebih terjangkau oleh petani, juga sebagai salah satu solusi untuk

mengatasi ketergantungan petani terhadap pupuk kimiawi, yang notabene menggunakan bahan baku impor.

Tidak berlebihan jika kemudian Dedi yang didampingi oleh beberapa Anggota Komisi IV DPR RI lainnya seperti Guntur Sasono, Alien Mus, Slamet, Vita Ervina, Emma Umiyatul chusna, Abdullah Tuasikal, T.A Khalid, dan Mutarom berharap ke depan akan dapat muncul pabrik-pabrik sejenis di seluruh Indonesia, yang bisa mengolah limbah atau sampah pasar menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian dan masyarakat. ■ ayu/es



Wakil ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI mengunjungi PT. Bio Konversi Indonesia di Bekasi, Jawa Barat. Foto: Ayu/MAN

Legislator Apresiasi Peran BP2JK Cegah Monopoli Tender

Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri mengapresiasi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang baru berusia kurang dari dua tahun, namun sudah berperan besar mencegah praktek terjadinya monopoli dalam suatu lelang proyek atau tender. Sehingga, menurutnya, hal ini memberikan ruang terbuka bagi seluruh calon pelaku jasa konstruksi untuk ikut serta dalam tender program Pemerintah.

Pemaparan tersebut disampaikan Bakri saat mengikuti RDP Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan masing-masing Kepala Balai BP2JK dari 34 Provinsi seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9). Rapat ini digelar secara fisik dan virtual.

“BP2JK mendapat sorotan positif dari Komisi V karena bisa mencegah monopoli. Hadirnya BP2JK memberikan ruang terbuka bagi para calon pelaku jasa konstruksi untuk ikut andil dalam program pemerintah. Oleh sebab itu,

Komisi V mengapresiasi BP2JK yang baru terhitung menginjak usia satu tahun lebih sudah bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik,” ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengungkapkan, ke depannya Komisi V DPR RI menginginkan agar BP2JK terus dapat konsisten independen, berdiri sendiri dan tidak tergantung oleh unit kerja lainnya. Seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air yang menitipkan kegiatannya kepada BP2JK untuk melakukan tender.

“Yang terpenting, bagi Komisi V DPR RI bagaimana BP2JK ini baik dalam pengelolaan tender atau

pengelolaan lelang proyek ini betul-betul menghasilkan suatu kegiatan dengan melibatkan kontraktor atau pelaku jasa konstruksi yang bisa mempertanggungjawabkan hasil. Itu yang kita inginkan,” tandas Bakri.

Di sisi lain, Bakri mengapresiasi program padat karya Kementerian PUPR yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. “Program padat karya inilah yang dibutuhkan masyarakat saat-saat ini. Bukan hanya dengan memberikan bantuan dalam bentuk *cash*, namun dengan adanya kegiatan padat karya juga dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga, masyarakat betul-betul bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat,” pungkas legislator daerah pemilihan Jambi itu. ■ pun/sf

”

BUKAN HANYA DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN DALAM BENTUK CASH, NAMUN DENGAN ADANYA KEGIATAN PADAT KARYA JUGA DAPAT MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA



Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri. Foto: Runi/MAN

Kementerian BUMN Harus Bersihkan Dugaan Proyek Fiktif Waskita

Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha mendukung upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir untuk terus melakukan 'bersih-bersih' terhadap semua perusahaan plat merah. Terlebih, ujarnya baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membongkar kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif di PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Saya dukung Pak Erick Thohir untuk terus bersih-bersih di perusahaan BUMN. Lanjutkan Pak! Jangan hanya gebrakan sebentar saja, lalu hilang. Karena masih ada saja perusahaan BUMN yang bandel dan nakal. *Lah*, KPK baru mengungkap dugaan 14 proyek fiktif di PT Waskita Karya," papar Toha usai Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Toha pun mendorong Erick Thohir untuk lebih berani dan bersikap tegas tidak hanya kepada jajaran perusahaan BUMN yang bandel dan nakal. Namun juga kepada jajaran di kementeriannya yang mengetahui adanya permainan-permainan di jajaran BUMN, tapi dibiarkan, atau bahkan ikut mengatur kongkalikong tersebut.

"Apa yang terjadi di Waskita Karya hingga merugikan negara Rp 202 miliar itu sangat mustahil tidak diketahui oleh pejabat di Kementerian BUMN. Pak Erick harus berani menyelidiki dan mengusut tuntas ada tidak jajarannya yang terlibat kasus tersebut," ungkap politisi Fraksi PKB ini.



Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha. Foto: Azka/MAN

Sebab itu, Toha meminta Erick proaktif membantu KPK untuk mengungkap secara terbuka siapa saja di BUMN yang ikut bermain dalam kasus itu. "Proyek fiktif yang jumlahnya sampai 14 pekerjaan secara logika pasti

ada yang pejabat atau petinggi lainnya yang berperan sebagai perencana, dan pengatur permainan. Siapa saja? Ini harus dicari tahu Pak Erick untuk mencegah hal sama di perusahaan BUMN lainnya," ucap Toha.

Sebelumnya, penyidik KPK menduga banyak pihak turut menerima uang panas terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Saat ini, KPK sedang menelusuri pihak-pihak yang turut menerima uang panas tersebut.

Hal tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa *General Manager* Akuntansi PT. Waskita Beton Precast, Dwi Anggoro Setiawan dan seorang Karyawan PT. Waskita Karya, Hendra Adityawan pada Senin, 10 Agustus 2020 lalu. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

■ er/sf

”

PROYEK FIKTIF YANG JUMLAHNYA SAMPAI 14 PEKERJAAN SECARA LOGIKA PASTI ADA YANG PEJABAT ATAU PETINGGI LAINNYA YANG BERPERAN SEBAGAI PERENCANA, DAN PENGATUR PERMAINAN

Anggota DPR Harap Rakyat Tidak Dibebani Pembayaran Vaksin Covid-19

Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mempertanyakan pernyataan Ketua pelaksana Pemulihan Gugus Tugas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN Erick Tohir yang mengatakan harga vaksin Covid sekitar 5-30 dollar Amerika Serikat (AS). Setiap orangnya diperlukan dua hingga tiga kali suntik untuk hasil yang maksimal, dimana satu kali vaksin dibiayai oleh negara dan satu kalinya dibayar secara mandiri oleh masyarakat.

“Bicara masalah vaksin adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga ketika ada pemberitaan tentang vaksin, seperti ada angin segar dan energi positif, serta tentunya harapan besar bagi masyarakat. Tentunya kami mendukung penuh percepatan penemuan vaksin Merah Putih ini,” ujar Mulan yang hadir secara virtual dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9).

Sayangnya, lanjut Mulan, beberapa waktu lalu disampaikan tentang harga vaksin yang bervariasi mulai dari 5 sampai 30 dollar AS dengan rencana pemberian vaksin, dua kali suntik untuk setiap orangnya. Dimana satu kali suntik dibiayai oleh Pemerintah dan satu lagi dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, harga dan pembiayaan vaksin yang disampaikan Ketua pelaksana Pemulihan Gugus Tugas Covid-19 Erick Thohir bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan



Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela. Foto: Azka/MAN

”

SEHINGGA KETIKA ADA PEMBERITAAN TENTANG VAKSIN, SPERTI ADA ANGIN SEGAR DAN ENERGI POSITIF, SERTA TENTUNYA HARAPAN BESAR BAGI MASYARAKAT. TENTUNYA KAMI MENDUKUNG PENUH PERCEPATAN PENEMUAN VAKSIN MERAH PUTIH INI

oleh Menristek pada Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI. Dimana, Menristek memaparkan harga vaksin 5 dolar AS per satu kali suntik, masing-masing direncanakan akan disuntik sebanyak dua kali dan semuanya biayanya ditanggung oleh Pemerintah.

“Yang jadi pertanyaan saya, apakah vaksin yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir dan Bapak Menristek ini sama atau berbeda? Mengapa ada perbedaan harga? Terus kenapa ada pemberitahuan bahwa masyarakat juga harus membayar secara mandiri satu kali suntik vaksin. Ini menurut saya cukup meresahkan masyarakat, dan saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Erick itu tidak benar-benar terjadi. Kasihan rakyat Pak, jika harus kembali dibebani dengan membayar satu kali vaksin,” harapnya. ■ ayu/es

Legislator Tegaskan Pentingnya Edukasi Kebencanaan Kepada Masyarakat

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan pelatihan dan edukasi mengenai bencana alam di seluruh wilayah Indonesia kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar edukasi tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, sehingga ketika terjadi musibah masyarakat sudah mengerti tata cara dalam menanganinya.

“Kuncinya berikan edukasi publik ke daerah-daerah terpencil juga, jangan hanya di kota-kota besar saja. Banyak sekali masyarakat yang kurang paham mengenai (kebencanaan) ini, jadi harapannya itu (juga) berikan pelatihan kepada masyarakat pendalaman,” kata Selly saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI secara virtual dengan jajaran BNPB, di Kompleks Parlemen, Rabu (9/9).

Anggota Komisi VIII DPR RI
Selly Andriany Gantina.
Foto: Andri/MAN

”

**KUNCINYA BERIKAN
EDUKASI PUBLIK KE
DAERAH-DAERAH
TERPENCIL JUGA,
JANGAN HANYA
DI KOTA-KOTA
BESAR SAJA**

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan BNPB merupakan harapan masyarakat dalam menangani dan memberikan bantuan dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. “Masyarakat itu kan harapannya BNPB dalam memberikan bantuan dan memberikan pelatihan, jadi jangan disia-siakan,” pungkas legislator Jawa Barat VIII itu.

Di sisi lain, terkait meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, Selly menilai hal itu diakibatkan sikap Pemerintah yang terlambat dalam merespon pandemi tersebut. Ia meminta BNPB untuk memiliki strategi jangka panjang yang tepat guna menanggulangi bencana. “BNPB harus punya strategi jangka panjang. Jangan ketika sedang terjadi bencana saja. Jadi intinya harus siap dengan bencana-bencana yang akan melanda Indonesia nantinya,” imbuh mantan Wakil Bupati Cirebon itu. ■ tn/sf



Pernyataan "Radikalisme" dari Menag Buat Kegaduhan



Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (kiri) saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Gerladi/MAN

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi mengenai paham radikalisme yang terbentuk dari anak-anak yang mengerti agama, berpenampilan menarik (*good looking*) tidak tepat dan dapat membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

"Komisi VIII menyayangkan pernyataan yang dibuat Menteri Agama mengenai paham radikalisme, ini dapat membuat pro dan kontra serta membuat kegaduhan publik," papar Yandri saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR

RI bersama Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Yandri menilai Menteri Agama sudah sering membuat keresahan di tengah masyarakat dan menyebabkan polemik seperti larangan memakai cadar, celana cingkrang dan yang terbaru paham radikalisme yang terbentuk berdasarkan anak berpenampilan menarik yang menguasai Bahasa Arab dan Al Qur'an.

"Pak Menteri sudah sering buat kegaduhan mulai dari larangan memakai cadar, celana cingkrang dan yang terbaru institusi pemerintahan

dapat disusupi paham radikal yang diawali dari mengirim anak yang *good looking* untuk mendapat simpati, seperti anak yang menguasai bahasa Arab," kritik Yandri.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengungkapkan pernyataan yang dibuat oleh Menteri Agama menarasikan seolah-olah yang pandai Al Qur'an sebagai orang radikal. "Saya minta penjelasannya mengenai ini Pak Menteri. Jangan sampai nanti masyarakat salah dalam menafsirkannya," ungkap legislator dapil Banten II itu. ■ tn/sf

Saleh Daulay: 59 Negara Larang WNI Masuk, Bukti Penanganan Covid-19 Bermasalah

Warga Negara Indonesia (WNI) secara resmi dilarang masuk ke 59 negara. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hal ini merupakan bukti ada masalah dalam penanganan virus Corona (Covid-19) di dalam negeri, sehingga 59 negara tersebut pantas khawatir dengan penyebaran virus dari para WNI. Larangan yang diberlakukan 59 negara terhadap WNI penting diperhatikan dan disikapi oleh Pemerintah Indonesia, karena berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk kegiatan ekonomi WNI di 59 negara tersebut.

“Kalau WNI kita tidak boleh masuk, tentu ini akan menyisakan masalah. Bisa saja, WNI yang mau berkunjung itu adalah untuk menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi. Di tengah pandemi seperti ini, hanya orang-orang yang berkepentingan khusus yang membutuhkan perjalanan ke luar negeri. Sebaliknya, jika negara tersebut melarang WNI masuk, pasti warga negaranya pun akan dilarang berkunjung ke Indonesia,” ungkap Saleh dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Rabu (9/9).

Implikasinya, tingkat kunjungan ke Indonesia juga berkurang dan pariwisata nasional kena dampak yang luar biasa. Dalam konteks itu, lanjut legislator dapil Sumatera Utara II ini, Pemerintah perlu bekerja keras meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia. “Kita harus membuktikan bahwa penanganan

Covid-19 di Indonesia berhasil. Dan itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO dan lembaga-lembaga kesehatan internasional lainnya,” harap Ketua F-PAN DPR RI ini.

Saleh mendesak agar Pemerintah memperbanyak *tracing* dan *testing*. Namun, *tracing* dan *testing* itu mestinya tidak semakin memperbanyak yang terkonfirmasi positif Covid. Yang paling baik adalah, *testing* dan *tracing* dilakukan secara massif, namun yang terkonfirmasi positif semakin turun. “Pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menegakkan disiplin

pelaksanaan protokol Covid di tengah masyarakat,” imbuh Saleh.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, Indonesia tidak bisa menolak jika negara lain melarang WNI masuk ke negaranya. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak jika 59 negara itu melarang warganya ke Indonesia. “Yang paling bisa kita lakukan adalah berperang melawan Covid-19 dan memenangkan peperangan tersebut. Sejauh ini, banyak yang menilai bahwa kita memang belum mampu menangani Covid-19. Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemerintah,” tutup Saleh. ■ mh/sf



Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Jaka/MAN

RUU SKN Bahas Klaster Sarpras Olahraga

Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Komisi X DPR RI kini mulai membahas klaster sarana dan prasarana (sarpras) olahraga. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, sarpras ini penting untuk menunjang prestasi olahraga para atlet nasional. Namun, di sisi lain banyak masalah dan kendala dalam membangun sarpras.

“Pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sarpras olahraga sesuai dengan kewenangannya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian.
Foto: Jaka/MAN

Kewajiban ini juga harus memperhatikan hak penyandang disabilitas,” kata Hetifah saat memimpin RDPU Komisi X DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kadis Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, pengurus padepokan wushu Kota Bogor, dan Pusat Pengelola GBK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Pemerintah, kata politisi Partai Golkar itu, harus pula menjamin ketersediaan sarpras sesuai standar kebutuhan, memenuhi jumlah dan standar minimum, serta harus memperhatikan potensi keolahragaan di daerah setempat.

Komisi X DPR RI ingin menerima input dari berbagai perspektif para pengelola sarpras olahraga di Tanah Air. Klaster sarpras ternyata menyajikan banyak sekali masalah yang harus diselesaikan Pemerintah. “Dalam prakteknya, pembangunan sarpras olahraga banyak sekali menemui kendala dan permasalahan, sehingga kurang merata. Banyak

”

DALAM PRAKTEKNYA, PEMBANGUNAN SARPRAS OLAHRAGA BANYAK SEKALI MENEMUI KENDALA DAN PERMASALAHAN, SEHINGGA KURANG MERATA

yang pembangunannya mangkrak, kompleks olahraga terlantar pasca penyelenggaraan *event*, dan sebagainya. Terkait beberapa permasalahan tersebut, ada masukan agar Pemerintah menambah dan meningkatkan sarpras olahraga untuk mendukung prestasi olahraga,” pandang Hetifah.

Legislator asal Kalimantan Timur itu melanjutkan, Pemerintah harus didorong untuk membangun fasilitas olahraga andalan daerah, bahkan membentuk badan layanan umum dalam pengelolaan sarpras milik Pemerintah. Pada pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarpras sebetulnya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

“Dalam UU SKN yang sekarang berlaku telah diatur kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyediakan sarpras olahraga sebagai fasilitas umum. Bagaimana seharusnya sarpras olahraga ini dibangun, dikelola, dikembangkan, dan dipelihara? Lalu, aturan apa yang diperlukan bagi pengembangan olahraga nasional?” begitu Hetifah memaparkan persoalan klaster sarpras dalam RUU SKN. ■ mh/sf



DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Bea Meterai Dibawa ke Paripurna

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai untuk diteruskan ke pembahasan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam Paripurna DPR. Beleid tersebut nantinya akan mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang hanya mengatur dokumen dalam bentuk kertas dan belum mengatur dokumen elektronik.

Jika disahkan, RUU Bea Meterai juga akan mulai memberlakukan satu tarif meterai yakni Rp 10.000 per lembar meterai mulai 1 Januari 2021. Selama ini bea meterai memiliki dua tarif yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembar. Selain itu, batas nominal dokumen yang dikenai bea meterai, yaitu di atas Rp 5 juta.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan bahwa RUU tersebut pada pembicaraan tingkat I telah disetujui oleh hampir semua Fraksi di Komisi XI DPR RI. Dari sembilan fraksi, tercatat hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang memberikan sejumlah catatan.

"RUU Bea Meterai telah kita sepakati bersama Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, untuk kemudian kita sampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dilakukan pembahasan tingkat II di Paripurna nanti untuk disahkan," kata Dito usai menandatangani berkas acara pembahasan RUU Bea Meterai antara Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Pembahasan yang telah berlangsung sejak 2018 dan kemudian *carry over* dalam Prolegnas 2020 ini,



Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI saat menandatangani berkas acara pembahasan RUU Bea Meterai bersama Menteri Keuangan dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM. Foto: Arief/MAN

menghasilkan draf rancangan yang berisikan 32 pasal. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan sebelumnya mengatakan bahwa perubahan 6 klaster RUU Bea Meterai disusun berdasarkan perubahan zaman dan lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya di hadapan Komisi XI DPR RI menyebutkan klaster pertama yang disepakati memuat perluasan definisi dokumen objek bea meterai yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga.

Klaster kedua memuat perubahan tarif bea meterai menjadi tunggal senilai Rp 10.000, dari yang sebelumnya Rp 3.000 dan Rp 6.000. RUU Bea Meterai ini dipastikan tetap memihak usaha kecil dan menengah karena tidak perlu membayar bea meterai untuk

dokumen bernilai di bawah atau sama dengan Rp 5 juta. Pada ketentuan yang lama, dokumen di atas Rp 1 juta wajib membayar bea meterai. Klaster ketiga memuat pengaturan saat terutang yang diperinci per jenis dokumen.

Sementara klaster keempat berisi subjek bea meterai terbaru yang mengatur perincian pihak terutang berdasarkan jenis dokumen. Klaster kelima memuat ketentuan pembayaran bea meterai dengan menggunakan bea meterai elektronik yang sesuai perkembangan teknologi. Menurut Sri Mulyani, pengaturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik.

Klaster keenam berisi sanksi atas ketidakpatuhan membayar bea meterai. Sri Mulyani menyebut Panja menyepakati ada sanksi berupa administratif maupun pidana terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai. ■ alw/sf

Banggar Setujui RUU P2APBN 2019

Setelah melalui rangkaian pendalaman, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Sebelum dilakukan pengesahan, masing-masing fraksi pun telah menyampaikan pandangan mininya secara tertutup.

Dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya atas RUU P2APBN 2019. “Apakah semua anggota menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019?” tanya Said.

“Setuju,” jawab para Anggota Dewan yang hadir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Setelah RUU P2APBN 2019 ini disepakati oleh

Banggar, selanjutnya pembahasan akan dilakukan di tingkat Paripurna pada 15 September 2020 mendatang.

Berkenaan dengan pembahasan ini, Anggota Banggar Muhammad Yahya Zaini memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah dalam upaya meningkatkan capaian sasaran kerja di tahun 2019. “Fraksi Partai Golkar apresiasi Pemerintah karena dalam LKPP 2019 terdapat sejumlah capaian dalam indikator pembangunan yang antara lain berupa penurunan Angka kemiskinan pengangguran dan rasio gini,” ujar Yahya Zaini.

Diketahui pada 2019 angka kemiskinan tercatat 9,2 persen atau menurun dari 9,6 persen pada 2018. Tingkat pengangguran terbuka pada 2019 juga tercatat 5,28 persen atau menurun dari 5,34 persen di tahun 2018. Selain itu rasio gini yang mencerminkan

kesenjangan sosial juga menurun dari 0,384 pada 2018 menjadi 0,380 di 2019. Indeks pembangunan manusia juga tercatat meningkat dari 71,39 pada 2018 menjadi 71,92 pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersyukur APBN 2019 dapat diterima dengan baik sering dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Menkeu Sri Mulyani juga mengutarakan bahwa capaian ekonomi di 2019 tidaklah mudah. Sebab dinamika global baik dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, arah bank sentral AS yang sulit ditebak, hingga geopolitik global menjadi sentimen yang lekat di tahun lalu.

“Kami patut bersyukur 2019 masih dapat mendapatkan hal yang positif pada asumsi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat. Bahwa APBN 2019 baik pengelolaan pendapatan, belanja, utang sesuai standar akuntansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya,” pungkas Sri Mulyani. ■ hs/es



Badan Anggaran DPR RI menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Foto: OJJI/MAN

Baleg **Setujui** Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Jumat (4/9), menyetujui harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Supratman mengatakan, berdasarkan pandangan seluruh fraksi di DPR, 8 Fraksi telah memberikan persetujuan, sedangkan, 1 Fraksi yakni Fraksi Partai Golkar masih menunggu pendapat resmi dari Ketua Fraksi Partai Golkar. Namun, pada prinsipnya semua fraksi menyetujui harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pada rapat tersebut, Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya memaparkan beberapa hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU yang disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul. Diantaranya, yaitu perbaikan definisi 'Masyarakat Hukum Adat', 'Wilayah Adat', 'Hak Ulayat', dan menambahkan definisi 'Tanah Ulayat' dalam Ketentuan Umum (Bab I Pasal 1).

Adapun, beberapa poin lainnya yang mencuat dalam pembahasan yakni penambahan tujuan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 3 huruf f, mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Willy mengungkapkan, RUU



Pimpinan Baleg DPR RI menerima pandangan F-NasDem terkait RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Foto: Jaka/MAN

tentang Masyarakat Hukum Adat secara sistematis terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal. Berdasarkan teknis dan perumusan dan substansi RUU, sambungnya, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. "Selanjutnya, kami serahkan kepada Rapat Pleno Baleg DPR RI untuk memutuskan apakah hasil kerja Panja dapat diterima," ujar Willy.

Menanggapi hasil laporan Ketua Panja tersebut, Supratman menanyakan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang

hadir apakah pengharmonisasian dan pembulatan konsepsi Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat bisa disetujui yang kemudian serempak dijawab "Setuju" oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang hadir fisik dan virtual.

Selanjutnya, Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu dari meja pimpinan Baleg DPR RI kemudian mempersilakan kepada segenap pimpinan dan perwakilan fraksi-fraksi yang hadir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI untuk menandatangani draf RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. ■ pun/es

Jasindo Harus Selalu *Update* Data Peserta Jamkestama

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Gatot Sudjito mengatakan, penting bagi PT. Asuransi Jasindo selaku operator Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk selalu memberikan data terbaru (*update*) kepada rumah sakit *provider* terutama di daerah-daerah, agar pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya sebagai peserta Jamkestama terlayani dengan baik.

Saat mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini, Gatot mengatakan bahwa tidak semua keluarga Anggota DPR RI tinggal di Jakarta. Sehingga, dengan adanya *update* data, keluarga yang ada di daerah pemilihan (*dapil*) pun tetap akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit *provider*.

“Misalkan saya, di *dapil* Jawa Timur VII ini, manakala ada suatu hal menyangkut istri dan anak saya sakit, maka rujukannya ini jangan sampai RS *provider* dari Jasindo ini tidak ada data tentang keluarga, sehingga membuat pelayanan tidak memadai. Tentu saja ini mengganggu konsentrasi kinerja

dewan manakala Anggota Dewan-nya di sini, dan anaknya sakit (di *dapil*) tidak diberikan pelayanan yang baik,” terang politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BURT DPR RI Paramita Widya Kusuma. Ia menilai kecepatan dalam melakukan *updating* data harus ditingkatkan baik itu oleh pihak rumah sakit juga PT. Asuransi Jasindo. Jangan sampai ditemukan nama Anggota DPR RI beserta keluarganya tidak tercantum dalam *database* rumah sakit *provider*.

“Perlu peningkatan kualitas *updating* data. Karena saat ini harusnya sudah menggunakan sistem *online*. Dimanapun rumah sakitnya, harusnya ada data dari Anggota DPR RI ditambah keluarga dari Anggota DPR RI tersebut. Kita juga menekankan kepada Jasindo

untuk memberikan kualitas yang prima terhadap Anggota DPR RI,” ungkapnya.

Khusus kepada jajaran PT. Asuransi Jasindo, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meminta untuk terus meningkatkan pelayanan dari rumah sakit *provider*. “Bila ada yang tidak mengikuti dan meningkatkan pelayanan terhadap peserta Jamkestama, mungkin Jasindo bisa lebih mengevaluasi,” pungkas Paramita. ■ es

Anggota BURT DPR RI
Gatot Sudjito.
Foto: Azka/MAN



”

BILA ADA YANG TIDAK MENGIKUTI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP PESERTA JAMKESTAMA, MUNGKIN JASINDO BISA LEBIH MENGEVALUASI

Pengalokasian Penerima Subsidi Perlu Dibenahi

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menuturkan kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Namun pada praktiknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

Hal ini dikatakan Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap penelaahan distribusi subsidi energy di Serang, Banten, Selasa (8/9). Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial (social spending), kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif.

“Kebijakan subsidi di Indonesia seharusnya menyasar pada kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan

sosial. Namun, nyatanya subsidi masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin,” ungkap Marwan.

Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat itu, ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Ia menilai perlu ada terobosan-terobosan agar pengelolaan subsidi itu tepat sasaran.

“Perlu adanya cara baru dalam pengelolaan subsidi agar tepat sasaran. Penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai konsumen subsidi energi juga perlu dilakukan,” tuturnya, seraya mengatakan harapannya agar subsidi bisa menjadi bantalan untuk

masyarakat menuju kesejahteraan.

Diketahui, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Ro 100 triliun setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari lima kementerian dan lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp 400 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan elpiji turun Rp 4,7 triliun menjadi Rp 70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp 75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp 54,8 triliun, turun Rp 7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp62,2 triliun. ■ rnm/es



Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan saat memimpin Kunker BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan penelaahan distribusi subsidi energi di Serang, Banten. Foto: Ria/MAN

Puan Maharani Dorong Ciptakan Kebijakan Penanganan Covid-19 di ASEAN



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Sidang Umum ke-41 AIPA. Foto: Kresno/MAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk menghasilkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 dan menjaga stabilitas perdamaian serta keamanan di wilayah Asia Tenggara. Puan menekankan, pandemi Covid-19 membawa dampak pada manusia dan pembatasan kegiatan ekonomi yang dapat mengakibatkan kawasan berada di ambang resesi.

Karena itu, Puan mendorong parlemen Negara Anggota ASEAN untuk menghasilkan kebijakan yang memadai dalam rangka membatasi penyebaran Covid-19, mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar, dan memastikan kesejahteraan sosial. “Optimalkan peran parlemen dengan menjalankan tugas legislasi terkait penanggulangan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, seperti merumuskan undang-undang terkait stimulus fiskal

atau penguatan jaring pengaman sosial,” ujar Puan dalam Sidang Umum ke-41 AIPA secara virtual, Selasa (8/9).

“Dengan semangat ‘Gotong Royong’, yang merupakan istilah tradisional Indonesia untuk bekerja secara kolektif, kita akan dapat mencapai satu tujuan bersama untuk melalui pandemi Covid-19 ini,” sambung Puan yang menjadi pimpinan Delegasi DPR RI dalam sidang yang digelar secara virtual dari Vietnam tersebut. Puan mengungkapkan, parlemen harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan Undang-Undang benar-benar diterapkan dan manfaatnya dirasakan rakyat.

Mengenai isu perdamaian, Puan berpandangan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas selalu menjadi faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan di Asia Tenggara. “Penting bagi kita untuk tetap memelihara Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bersahabat, dan

harmonis, guna meningkatkan kerja sama untuk membatasi penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya,” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk memprioritaskan perdamaian, menghindari ketegangan, menahan diri, dan mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan antara negara-negara anggota ASEAN dengan menekankan pada sentralitas ASEAN.

Parlemen anggota AIPA, kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) masa jabatan 2014-2019 itu, juga harus mendorong negara anggota ASEAN untuk tunduk pada hukum internasional seperti United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai acuan dalam menentukan hak maritim, hak berdaulat, dan kepentingan yang sah atas kawasan laut. “Kode Etik di Laut Cina Selatan juga harus dikembangkan sebagai kerangka yang disepakati bersama untuk dialog dan konsultasi antara ASEAN dan Cina di Laut Cina Selatan sembari kita berharap proses yang baik tersebut dapat tercermin di lapangan,” ungkapnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengajak parlemen negara-negara ASEAN untuk peduli dan menjadi yang pertama dalam menjawab eksekusi di Rakhine, di mana para pengungsi menjadi korban perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Puan menekankan, untuk dapat maju sebagai komunitas ASEAN yang kohesif dan responsif, semua anggotanya harus meningkatkan kapasitas untuk menanggapi secara efektif tantangan regional yang muncul termasuk dalam konteks keamanan manusia. ■sf

BKSAP Perjuangkan Resolusi Perdamaian LCS dan Rohingya pada Sidang AIPA

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di *General Assembly Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* ke 41 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9). Sidang Umum AIPA yang berlangsung pada 8-10 September 2020 ini, untuk pertama kalinya digelar virtual di bawah koordinasi Vietnam, selaku Ketua ASEAN tahun ini.

Dalam sidang Komisi Politik, Fadli memperjuangkan dua draf resolusi, antara lain mengenai pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS) dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya

di Rakhine. Ia menekankan pentingnya perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN, termasuk dinamika yang terjadi di perairan LCS.

Kesolidan dan kolektivitas ASEAN dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu, ASEAN diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu internal kawasan secara mandiri, termasuk isu kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.

Menyangkut isu Rohingya, Fadli menyesalkan Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI mengenai perlunya penguatan dari parlemen, sebagaimana disepakati Pemerintah Negara ASEAN, agar Pemerintah Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses

repatriasi yang aman dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya. Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek “spillover” di kawasan.

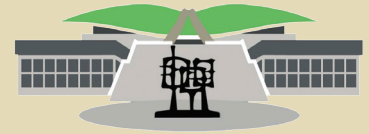
“Efek *spillover* yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain di kawasan, terutama pada masa pandemi ini,” ujar Fadli. Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, ASEAN perlu menyelesaikan masalah bagi sekitar satu juta pengungsi Rohingya terutama terkait kesepakatan repatriasi.

“Karena itu, DPR RI menegaskan posisinya terkait isu kemanusiaan di Rakhine. Bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atau usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan resolusi apapun,” tandas Fadli yang dalam kesempatan ini didampingi Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana dan Anggota BKSAP Didi Irawady Samsudin.

SIUM AIPA ke-41 ini diikuti 10 parlemen dari kawasan ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan beberapa pengamat. Delegasi secara daring mengikuti rangkaian SIUM ke-41 AIPA yang akan membahas pelbagai hal terkait isu politik, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian yang diharapkan dapat mengadopsi sejumlah resolusi. ■ ann/sf



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (tengah) didampingi Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI mengikuti sidang Komisi Politik di Sidang Umum AIPA ke-41 yang diselenggarakan secara daring. Foto: Abu/MAN



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin bersama Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menghadiri sidang Sidang Umum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-41 di Vietnam yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9). Foto: Mario/MAN



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Elisabeth Kobak menerima audiensi masyarakat adat Suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bontuni, Papua Barat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9). Foto: Jaka/MAN



KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan musyawarah dalam rangka Penyampaian Pertanggungjawaban Kepengurusan KORPRI Periode 2015-2020 dan Pemilihan Ketua KORPRI 2020-2025, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat, (11/9). Foto: Runi/Man

